

ANALISIS SEMIOTIKA PAPAN REKLAME PADA IKLAN KAMPANYE POLITIK 2 KANDIDAT CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

Andri Setiawan¹, M Fadel², Tira Fitriawardhani³

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya
setia.andry13@gmail.com, tira@ubhara.ac.id, fadel@ubhara.ac.id

Abstrak

Tahun 2020 menjadi tahun pertarungan politik dikota Surabaya dengan adanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 9 Desember 2020. Pilwali tahun ini sangat menarik karena terpilihnya dua kandidat yaitu pasangan no urut satu Ery Cahyadi dan Armuji yang akan bersaing dengan lawannya no urut dua Machfud Arifin dan Mujiaman. Walaupun teknologi sudah mulai canggih papan reklame dipilih sebagai media kampanye karena masih efektif dan efisien untuk bisa menjangkau masyarakat luas dalam hal periklanan.

Tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui makna pesan yang terkandung pada papan reklame iklan kampanye politik 2 kandidat calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya tahun 2020. Penelitian ini berlandaskan teori Semiotika Roland Barthes dengan menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Data – data dikumpulkan melalui dokumentasi lapangan dan melakukan pengamatan berdasarkan teori semiotika.

Hasil yang didapat pada reklame iklan kampanye tersebut yaitu ditemukannya adanya hubungan penanda dan petanda yang menjelaskan secara nyata tatanan denotatif, kemudian terdapat pula interaksi antara tanda dengan perasaan emosi pembaca serta nilai – nilai kebudayaan yang membawa ketatanan konotatif, sehingga ditemukannya sebuah makna tersendiri yang terdapat pada setiap versi iklan kedua kandidat Calon Walikota Surabaya dan memiliki pengaruh yang kuat dalam kerangka berpikir pembaca.

Kata Kunci : *Semiotika, Reklame, Pilwali, Kampanye Politik*

1. PENDAHULUAN

Tahun 2020 menjadi tahun pertarungan politik di kota Surabaya yaitu adanya perebutan kursi kekuasaan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode 2021 – 2024 setelah ditetapkannya 2 kandidat calon yang akan memimpin Kota Surabaya selanjutnya. Mendekati masa pemilihan yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020, membuat kedua calon bersaing dalam pilwali kali ini, berbagai strategi kampanye telah dilakukan dengan cara membuat iklan – iklan politik yang mana bertujuan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mendukung dan memilih paslon yang akan memimpin kotanya kedepan.

Kampanye dari tahun ketahun masih banyak dilakukan dengan cara memanfaatkan media luar ruang walaupun teknologi dan informasi sudah semakin canggih. Seperti contohnya papan reklame yang masih dipilih dan digunakan karena dinilai sangat efektif dan efisien dalam menjangkau masyarakat luas dalam hal periklanan. Dilansir dari detik.com reklame menjadi atribut kampanye yang masih diminati karena dinilai sangat efektif dan efisien, berdasarkan melihat hasil survei menyatakan responden lebih banyak memilih media reklame sebagai media yang efektif untuk menjangkau setiap orang pada saat pesta demokrasi, karena pada dasarnya reklame ditempatkan ditempat

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PROGAM PEMERLU PENYANDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Nastasya Dwi Juwita¹, Susi Ratnawati², Ismail³

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya
natasyadj5@gmail.com¹, susiratnawati@ubhara.ac.id², ismail@ubhara.ac.id³

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah yaitu sebuah penanganan terbaik dari berbagai macam alternatif lainnya dan bersaing dengan satu sama lain. Kegiatan kebijakan pemerintah ini, berlangsung secara terus menerus. Implementasi program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti lanjut usia, keluarga tidak mampu, anak jalanan, fakir miskin, dimana di dalam pelaksanaan tersebut membutuhkan sebuah manajemen yang baik dan untuk upaya pemenuhan tujuan dari diadakannya implementasi kebijakan pemerintah dan sebagai ketepatan sasaran. Tujuan penulisan kali ini, untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan sebagai upaya untuk pencegahan pemerlu kesejahteraan sosial. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Pada penelitian ini, secara garis besar, program pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) berdasarkan dengan landasan Undang – Undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan sosial yang telah di terapkan oleh Dinas Sosial kota Surabaya untuk melakukan mewujudkan kehidupan yang lebih layak serta memenuhi ha katas kebutuhan dasar bagi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Kata kunci : *Implementasi, kebijakan pemerintah, Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)*

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kementrian sosial mengganti sebuah sebutan bagi penerima bantuan sosial, awal mulanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kini menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Pemerlu pada penelitian kali ini di fokuskan kepada kemiskinan, pemberian bantuan sosial, dan pelayanan disabilitas, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani rohani ataupun sosial secara memadai dan juga wajar perda (**Permensos No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial**). Di dalam berbagai kota besar pada negara berkembang seperti Indonesia ini, harus diakui bahwa perkembangan pola kehidupan di perkotaan saat ini yang semakin pesat dan berkembang sering kali tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan kota. Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya

merupakan perwujudan dari upaya demi mencapai tujuan bangsa. Upaya menanggulani kemiskinan merupakan prioritas yang sangat perlu di terapkan di dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.

Oleh karena itu dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial sangat diperlukan dari berbagai pihak, baik diantaranya dari peran masyarakat, perorangan, pihak keluarga, organisasi, lembaga kesejahteraan sosial demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan terencana. Dalam **Undang – undang No. 11 Tahun 2009** tentang kesejahteraan sosial, memalui implementasi perda No. 02 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tujuan kepada perseorangan, keluarga, masyarakat dan terutama di prioritaskan kepada masyarakat yang tidak mempunyai kehidupan yang layak atau kurang tercukupi.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 kota Surabaya menganggarkan dana sebesar Rp 10,3 Triliun di anggarakan untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Dari nilai 10,3 Triliun ini di alokasikan Rp 140 miliar untuk kegiatan permakanan. Sasaran pada kegiatan permakanan di kota Surabaya ini seperti lanjut usia, masyarakat miskin dan juga warga terlantar. Selain itu salah satu progam penanggulangan kemiskinan yaitu memperbaiki rumah yang tidak layak humi. Pada setiap rumah akan di alokasikan dana sebesar Rp 30 juta.

1.2 Rumusan masalah

- a. Bagaimana implementasi beserta kebijakan Dinas Sosial Surabaya dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Faktor apa saja yang mendukung dalam proses implementasi kebijakan pemerintah kota, dalam progam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
- c. Faktor apa saja yang menghambat dalam proses implementasi kebijakan pemerintah kota, dalam progam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
- d. Bagaimana upaya yang tepat dalam penangan progam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

- Teknik pengumpulan data :

1.1 Wawancara

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan teknik wawancara. Metode wawancara atau interview ini adalah percakapan melalui dua orang atau bahkan lebih dengan cara bertatap muka sambil berbicara menyampaikan sebuah informasi. Metode wawancara ini guna untuk memperoleh informasi – informasi penting atau keterangan secara lisan dari seseorang.

1.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang merupakan pengambilan data berupa gambar, yang dapat di dokumentasikan. Sebagai salah satu contoh

dokumen yang dapat di dokumentasikan, seperti laporan, karya ilmiah yang dapat menunjang penulis melakukan pendokumentasian.

- Teknik Analisa data

Dalam penelitian kali ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana setelah data – data dikumpulkan secara lengkap dari lapangan dan kemudian menganalisa data tersebut. Di dalam tahap ini lah data di olah sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan yang penuis inginkan dan dapat di interpresikan guna dalam menarik suatu kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian. Dari hal tersebut terlibat di dalam proses analisis yang juga berhubungan untuk menentukan hasil akhir dari suatu analisis data. Tiga aspek tersebut meliputi:

- a. Data Reduction (Redukasi Data)

Data yang sudah didapat oleh peneliti di lapangan berjumlah sangat banyak, peneliti harus mencatat dengan teliti dan secara rinci. Dan redukasi data merupakan data yang sudah dirangkum dan juga dipilah – pilah untuk menemukan poin – poin penting yang akan fokus pada tema dan pola serta memilah data yang tidak perlu. Setelah itu peneliti juga Menyusun data yang akan peneliti simpulkan.

- b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka kemudian peneliti menyajikan data yang dimana bentuk serangkaian kata yang akan lebih singkat, diberikan bagan serta hubungan antar kategori yakni flowchart maupun lainnya. Selain itu peneliti dapat menggunakan sajian data yang berupa gambar, skema maupun makriks, dan menggunakan narasi kalimat. Untuk melakukan penyajian tersebut, maka yang sudah tertata dalam pola perhubungan itu akan membuat peneliti semakin mudah untuk memahami. Dengan adanya seperti itu dala penyajian data akan dipahami apa yang sedang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dimengerti.

- c. Conclusion Drawing (Verivikasi Data)

Dalam tahap ini dimana analisis akan merangkai suatu kesimpulan dan verivikasi. Dimana pada awal kesimpulan yang akan dijelaskan hanya bersifat

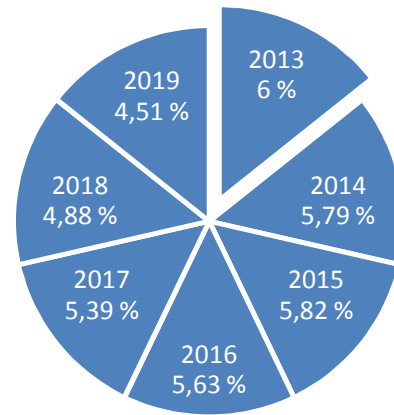
sementara, dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya dalam langkah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Implementasi kebijakan pemerintah kota dalam program PPKS

Istilah PPKS yang merupakan pengganti dari PMKS. Secara istilah terdapat pada perubahan nama. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang di karenakan suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara baik atau layak, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Program kesejahteraan sosial dalam hal ini sangat dibutuhkan mengingat para pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS) sebagai kelompok masyarakat rentan dalam menjalankan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Dalam hal ini program perlindungan social melalui proses pemberdayaan masyarakat, yang mana substansinya untuk mencapai tujuan menyejahterakan dan memandirikan masyarakat. Adapun program pengembangan social, yang merupakan program bantuan yang bisa bermanfaat sebagai penyangga kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Pentingnya bantuan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, untuk merasakan pelayanan dari negara khususnya pemerintah kota sebagai pihak yang mempunyai kewajiban supaya mendapatkan keadilan dari pembangunan kesejahteraan yang ada. Dalam implementasi kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam program pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), maka pemerintah kota Surabaya mengeluarkan kebijakan yaitu “Program pemberian permakanaan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial”. Program tersebut di tuangkan dalam peraturan perwali No. 76 Tahun 2012. Kebijakan tersebut dibuat merupakan salah satu upaya pemerintah kota Surabaya untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan

guna untuk mewujudkan taraf kesejahteraan masyarakat kota Surabaya.



1.2 Tujuan Implementasi

1. Untuk memenuhi kebutuhan dasar para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Menjamin terlaksananya terpenuhinya fungsi sosial dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Meningkatnya kesejahteraan social”

1.3 Program – program implementasi kebijakan pemerintah bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Di harapkan dengan adanya beberapa program yang telah di buat oleh pemerintah kota Surabaya ini dapat mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial. Beberapa program – program tersebut :

1. Perlindungan sosial
Upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga dapat mewujudkan taraf hidup yang lebih baik atau layak.
2. Jaminan sosial
Memberi pelayanan, bantuan sosial, pengendalian sosial dan juga pengorganisasian masyarakat dalam penanggulangan bencana sosial, korban konflik, dan korban terlantar. Pemerintah kota surabaya menyiapkan skema

jaminan sosial di peruntukan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

3. Pemberdayaan sosial
Dimana masyarakat dibentuk untuk memulai suatu kegiatan sosial guna untuk memperbaiki kondisi dan situasi pada diri sendiri.
4. Aspek rehabilitasi sosial
Kemampuan sosial yang terpenuhi seluruh aspek – aspek perkembangan, dapat mengatasi permasalahan pada kehidupan, kemampuan melaksanakan fungsi – fungsi sosial dan pengembangan potensi.

1.4 Faktor Pendukung

Terdiri dari beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam program pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk keperluan penanganan PPKS, dan juga di fasilitasi oleh bagian tim anggaran.
2. Adanya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kualifikasi dalam penanganan dari PPKS tersebut. Dari adanya kualifikasi yang berkompeten atau berpengalaman ini dapat berjalan dengan mudah dan tidak terkendala oleh faktor – faktor komunikasi atau pun interaksi.
3. Terdapat komunikasi yang baik dari berbagai instansi.
4. Kemampuan organisasi. Dalam tahap implementasi kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas yang seharusnya. Seperti yang telah di tetapkan atau di bebaskan pada salah satu unit organisasi.
5. Memiliki sikap pelaksanaan kebijakan yang memiliki rasa disiplin yang tinggi serta memiliki rasa kepedulian pada permasalahan yang terjadi.
6. Dukungan dari program pelaksana. Pelaksanaan program implementasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan berjalan dan berhasil apabila mendapatkan dukungan dari kelompok – kelompok kepentingan dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan program tersebut.
7. Dukungan dari berbagai lembaga – lembaga sosial dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).

1.5 Faktor Penghambat

Dalam kegiatan implementasi kebijakan oleh pemerintah Kota Surabaya, terdiri dari beberapa faktor penghambat yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan sesuai dengan program – program yang telah di lakukan, yaitu :

1. Faktor penghambat biasanya terjadi dari masyarakat atau PPKS itu sendiri yang merasa dirinya menjadi beban masyarakat, sehingga merasa tidak perlu untuk di tangani dan lebih menjadi beban oleh pemerintah Kota Surabaya.
2. Dari dukungan keluarga masyarakat atau PPKS itu sendiri. Seperti contoh salah satu keluarga dari masyarakat PPKS menutupi bahwa ada permasalahan masyarakat yang harus di tangani oleh pemerintah kota Surabaya.
3. Terdapat loyalitas ganda. Dalam banyak kasus, pihak pihak yang terlibat dalam menentukan sutau program, telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaanya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap program lain.
4. Kurangnya minat masyarakat atau kelompok PPKS untuk terlibat aktif dalam program yang telah di buat
Jumlah personel pemkot yang tergabung dalam Dinas Sosial cukup terbatas. Maka dari itu, upaya yang dilakukan pemerintah guna untuk mengatasi faktor penghambat yaitu melakukan monitoring secara acak. Pemantauan harian dengan cara mengamati atau mendatangi langsung tanpa memberi informasi terlebih dahulu.
5. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Semakin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana programdilakukan berarti makin banyak dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan program.

1.6 Upaya yang di lakukan pemerintah Kota Surabaya

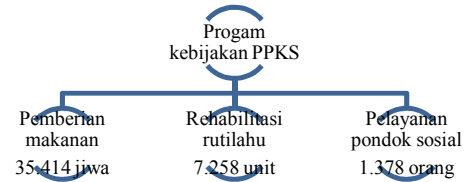
Dalam *peraturan wali kota Surabaya No 17 Tahun 2017*, terdapat berapat upaya dan salah satu nya upaya perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk memenuhi kebutuhan hak dasar berupa pangan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

seperti keluarga miskin, atau masyarakat terlantar. Terdapat beberapa upaya pemenuhan lainnya seperti lansia terlantar atau lansian yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sosialnya dengan baik, guna untuk menjamin tercapainya kesejahteraan bagi lansia yang terdiri dari : pemenuhan kebutuhan fisik (Sandang, Pangan, Papan).

Upaya program permakanan Dinas Sosial kota Surabaya kali ini, di terapkan dari tahun 2012 dengan ketentuan bagi penerima hanya benar – benar bagi pemerlu masyarakat miskin, dan lanjut usia. Secara teknis, program permakanan ini semakin berkembang pada tahun 2018, tidak hanya menjangkau bagi lansia miskin tetapi juga kepada yatim piatu, penyandang disabilitas. Secara teknis, program ini berbentuk pemberian makanan langsung menuju ke tempat tinggal para pemerlu kesejahteraan sosial. Telah di jelaskan dalam Perwali No. 17 Tahun 2017, yaitu :

1. Lanjut usia
Seseorang yang telah berumur 60 tahun lebih ke atas bahkan lebih, dan sudah tidak bisa menjalankan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Penyandang disabilitas
Program permakanan kali ini tertuju pada penyandang disabilitas, dimana mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental atau sensorik dengan jangka waktu yang cukup lama dimana saat berinteraksi dengan lingkungan dan tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya.
3. Yatim piatu
Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tuanya dan berasal dari keluarga fakir miskin.

Dapat di ketahui bahwa dari salah satu program pemerintah Kota Surabaya yaitu program permakanan yang di berikan oleh Dinas Sosial kota Surabaya kepada masyarakat pemerlu kesejahteraan baik warga lanjut usia, terlantar atau fakir miskin, yatim piatu, penyandang disabilitas sudah merasakan tercukupi dengan adanya program tersebut.



KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah kota Surabaya terkait dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dari data di atas yang telah terkumpul di lapangan, melalui wawancara dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam program PPKS, pemerintah mengeluarkan program permakanan yang di lakukan oleh Dinas Sosial kota Surabaya bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), sebagaimana dengan yang di nyatakan dalam perwali 17 tahun 2017 bertujuan dengan di adakannya program permakanan ini merupakan sebuah bentuk kebijakan publik yang di lakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk menangani atau mengurangi kesejahteraan sosial di kota Surabaya bagi disabilitas, penyandang sosial, yatim piatu, lanjut usia yang betul – betul membutuhkan peranan dari pemerintah untuk kesejahteraan hidupnya.

SARAN

1. Peran pemerintah kota Surabaya dalam mengatasi PPKS dengan pemerataan memberikan program makanan bagi para lansia sudah cukup baik. Selain itu dengan menciptakan berbagai program yang telah dibuat, pemerintah juga dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan kesenjangan yang ada di kota Surabaya. Dengan demikian lebih baik untuk di tingkatkan lagi untuk program UPTD dalam mengembangkan penyuluhan kegiatan untuk pelatihan terhadap PPKS.

2. Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) telah memiliki standarisasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dan memiliki tujuan yang jelas yaitu membantu, melindungi dan memberdayakan masyarakat dengan program pelayanan sebagaimana melalui instansi dan UPTD setempat, serta tempat – tempat pelatihan guna memberikan keterampilan atau bimbingan guna untuk memperbaiki taraf kehidupan.

REFERENSI

- Jonaidi, A (2012) Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi* 1(1) : 140-164.
- Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. 2008.
- Jurnal Adm Public*, Volume 1 No. 1 Tahun 2010) –, Grindle, MerileeS. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Gaya Media.
- Budi Winarno, *Teori Kebijaksanaan Publik* (Yogyakarta : Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada,1989).
- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2008. Bandung : Alfabeta.
- Diva Gede, *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah* Jakarta.,2009., Jakarta Bakrie School of Management.
- A.G.Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*. 2005. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- William Dunn., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*., 1990., Gadjah Mada University Press.
- Thoha Mifta., *Perilaku Organisasi*., 2003., Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Sumber Dokumen Lainnya :

- Undang – Undang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial - <https://peraturan.bpk.go.id/Diakses> pada tanggal 19 November 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,[https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11 Tahun 2009 uu.htm](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11_Tahun_2009_uu.htm), Diakses pada tanggal 10 Januari 2021.
- Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur No.53 Tahun 2016, https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2009.pdf, Diakses pada tanggal 4 April 2021.
- Peraturan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2017, [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47616/perwali-kota-surabaya-no.17 tahun 2017](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47616/perwali-kota-surabaya-no.17_tahun_2017), Diakses pada tanggal 5 mei 2021.

Sumber – sumber web lainnya :

- Informasi Pendidikan dan kebudayaan tentang Implementasi Kebijakan, <https://www.silabus.web.id/implementasi-kebijakan/>. Di akses pada tanggal 19 November 2020.
- Annur. Reza Attabiurrobbi, *Journal Universitas Negeri Semarang, Indonesia. 2013 Tentang Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan*, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020.
- Kondisi Geografis Surabaya, <http://dpmptsp.surabaya.go.id/v3/pages/geografis>. Diakses pada tanggal 4 April 2021.
- Visi dan Misi Dinas Sosial, <http://dinsos2.jatimprov.go.id/public/profil> - Diakses pada tanggal 12April 2021.